

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Organisasi public dituntut untuk bekerja lebih efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan perlu dilakukan seiring dengan bergulirnya reformasi birokrasi. Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun aparatur negara agar mampu mengemban misi, tugas, dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Sekretariat Daerah mempunyai fungsi penataan kelembagaan, kepegawaian, perencanaan pelatihan dan pendidikan, serta analisis jabatan. Kebutuhan pegawai di instansi pemerintah pada saat ini belum dihitung secara tepat. Jumlah dan penempatan yang tidak tepat mengakibatkan ketidakefisienan pekerjaan yang mengakibatkan banyaknya pekerjaan yang terbengkalai dan tumpang tindih serta pekerjaan yang tidak sesuai dengan deskripsi awalnya.

Analisis jabatan sangat penting dilakukan untuk menempatkan pegawai yang tepat dalam pekerjaannya. Deskripsi dan spesifikasi pekerjaan penting diketahui untuk menentukan individu yang berkompeten dalam bidang yang berkaitan. Kesalahan dalam analisis jabatan dapat menyebabkan organisasi salah dalam menentukan pegawai.

Analisis jabatan merupakan pengumpulan informasi mengenai suatu pekerjaan pegawai. Analisis jabatan Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Permendagri No. 35 Tahun 2012. Analisis jabatan diperlukan dalam rangka program penataan

kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian serta pendidikan yang berbasis pada kinerja. Aspek yang dianalisis adalah pelaksanaan pekerjaan yang menjabarkan fungsi-fungsi yang ada di setiap unit kerja. Instansi pemerintah maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib melakukan analisis jabatan. Analisis jabatan dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi dimana penerapan prinsip *the right man, on the right place*.

Dalam analisis jabatan terdapat 2 elemen yang harus diperhatikan, yaitu deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan, dimana kedua elemen ini saling berkaitan dalam menentukan kebutuhan pegawai yang diperlukan untuk memenuhi target pekerjaan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Karo mempunyai 12 bagian yang mempunyai tugas dan fungsi pokok sebagai perumus kebijakan, koordinasi program, pembinaan, pelayanan, dan pembinaan antar OPD. Setiap bagian tentunya memiliki pegawai yang mengerjakan bagiannya masing-masing.

Penempatan kerja pegawai negeri sipil selalu menjadi topic menarik karena kerap kali disuarakan bahwa penempatan kerja menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan agar dihasilkan kontribusi optimal bagi organisasi oleh pegawai yang bersangkutan. Secara teoritis, seperti yang disampaikan oleh Rivai (2012:198) bahwa penempatan pegawai dalam suatu organisasi harus memiliki kesesuaian antara kualifikasi atau latar belakang pendidikan pegawai dengan kualifikasi pekerjaan yang akan diembannya. Penempatan kerja yang tepat dalam arti sesuai dengan kemampuan pegawai sangat penting karena akan dapat memberikan dorongan kerja masing-masing pegawai. Timbulnya keinginan kuat kerja tersebut

mendorong pegawai dalam mengoptimalkan hasil kerjanya dan mampu menjalankan tugas dengan lancar. Penempatan pegawai yang berasal dari rekrutmen di luar instansi dilakukan apabila dalam instansi tidak tersedia atau kekurangan pegawai pada posisi tertentu, maka penempatan pegawai akan diambil melalui proses seleksi untuk mengisi posisi tersebut. Selain penempatan pegawai yang berasal dari penarikan (*recruitment*) dari luar instansi, penempatan pegawai juga bisa berasal dari dalam instansi atau dikenal dengan istilah alih tugas yaitu penempatan pegawai pada tugas baru dengan tanggung jawab yang relative sama dengan statusnya yang lama (Handoko, 2012:213). Dengan demikian pegawai akan ditempatkan pada satuan kerja baru.

Penempatan kerja juga bisa menjadi permasalahan tersendiri bagi pegawai negeri sipil. Pengembangan sumber daya pegawai negeri sipil kerap terhambat jika dihadapkan dengan masalah penempatan kerja. Ketidaksesuaian antara penempatan kerja dengan kemampuan dan keahlian pegawai tentunya akan berdampak pada hasil dan prestasi kerjanya. Hal ini menjadi persoalan tersendiri bagi badan/lembaga negara yang memiliki pegawai dengan latar belakang pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan domisili yang berbeda-beda.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan pada kantor Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Karo, penulis melihat banyaknya kesalahan data analisis dan juga dalam pemenuhan kebutuhan jumlah pegawai. Dari segala persoalan yang sudah diobservasi, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian :**Analisis Jabatan Dalam Penempatan Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Karo.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Analisis jabatan dalam penempatan pegawai negeri sipil di Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Karo masih ditemui kekurangan terutama dalam kelengkapan data dan pengetahuan penganalisis jabatan tersebut.
2. Penempatan pegawai negeri sipil di Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Karo masih ditemui kendala dalam hal persyaratan pekerjaan dengan SDM yang ada.

1.3 Batasan Masalah

Keterbatasan yang dimiliki peneliti dalam waktu, tenaga, pikiran, dan kemampuan, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu pada masalah analisis jabatan dan penempatan pegawai negeri sipil pada Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Karo.

1.4 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang permasalahan yang terjadi di Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Karo, maka dapat disusun suatu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimanakah Analisis Jabatan Dalam Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Karo?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian yang sudah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan utama penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pentingnya analisis jabatan dalam penempatan pegawai negeri sipil pada Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Karo.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah dan memberikan rekomendasi dalam upaya mengoptimalkan analisis jabatan dalam penempatan pegawai negeri sipil pada Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Karo.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Karo

Sebagai bahan pertimbangan dan salah satu sumber informasi bagi pihak Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Karo dalam upaya mengoptimalkan analisis jabatan dalam penempatan pegawai negeri sipil. Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya analisis jabatan dalam pemenuhan kebutuhan pegawai yang efektif dan efisien.

2. Bagi Peneliti

Untuk mengaplikasikan kemampuan akademis penulis dalam bentuk karya ilmiah melalui teori-teori yang sudah didapatkan penulis selama perkuliahan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya dalam judul yang sama.